

BULETIN APBN

Vol. X, Edisi 15, Agustus 2025

Tantangan Implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

p.4

Sekolah Rakyat sebagai Program Pendidikan Afirmatif: Analisis SWOT

p.9

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



9 772502 868006

ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H.,
M.H.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Penanggung Jawab

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H.,
M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA,
PQIA

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Editor

Riza Aditya Syafri
Orlando Raka Bestianta

Tantangan Implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

p.4

Ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan sosial, khususnya inclusion dan exclusion error, mendorong lahirnya kebijakan integrasi data melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2025. Tulisan ini menelaah sejauh mana Permensos tersebut mampu menjadi solusi dalam membenahi basis data penerima bansos. Melalui analisis kebijakan, pembelajaran dari negara-negara Amerika Latin, dan analisis gap, ditemukan bahwa Permensos telah memuat beberapa prinsip dasar sistem data tunggal, namun belum sepenuhnya memenuhi parameter keberhasilan seperti cakupan luas, pemanfaatan lintas sektor, dan transparansi skor penerima. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk: 1) menguatkan dasar hukum DTSEN dalam bentuk Undang-Undang; 2) menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan Permensos No. 3 Tahun 2025; 3) menetapkan target nasional cakupan DTSEN; 4) memperkuat mekanisme partisipasi dan transparansi publik; 5) membuat anggaran khusus untuk pengembangan dan pemutakhiran DTSEN; 6) melakukan investasi pada penguatan kapasitas SDM; 7) evaluasi dan monitoring berkala.

Sekolah Rakyat sebagai Program Pendidikan Afirmatif: Analisis SWOT

p.9

Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Inpres Nomor 8 Tahun 2025), Presiden menginstruksikan optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi seluruh komponen pemerintahan, yang salah satunya dimanifestasikan melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menawarkan pendidikan gratis beserta dengan fasilitas pendukung pendidikan lainnya dengan menyoar pada rumah tangga miskin dan miskin ekstrem. Artikel ini menganalisis program Sekolah Rakyat dengan pendekatan SWOT. Dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari program, harapannya Komisi VIII, IX, dan X dapat merekomendasikan dan merumuskan strategi kebijakan untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah guna perbaikan implementasi Sekolah Rakyat ke depannya.

Kritik/Saran

<http://pa3kn.dpr.go.id/kontak>

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id



**Next on
Buletin APBN
Edisi 16**

***Manufaktur Tertekan, Nasib Pekerja
Terancam***

***Trade-Off Kerangka Kerja Perjanjian
Perdagangan Resiprokal Amerika Serikat –
Indonesia dan Implikasinya***

Tantangan Implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

Jesly Yuriaty Panjaitan*)

Abstrak

Ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan sosial, khususnya *inclusion* dan *exclusion error*, mendorong lahirnya kebijakan integrasi data melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Permensos Nomor 3 Tahun 2025). Tulisan ini menelaah sejauh mana Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tersebut mampu menjadi solusi dalam membenahi basis data penerima bantuan sosial. Melalui analisis kebijakan, pembelajaran dari negara-negara Amerika Latin, dan analisis gap, ditemukan bahwa Permensos Nomor 3 Tahun 2025 telah memuat beberapa prinsip dasar sistem data tunggal, namun belum sepenuhnya memenuhi parameter keberhasilan seperti cakupan luas, pemanfaatan lintas sektor, dan transparansi skor penerima. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk: 1) menguatkan dasar hukum DTSEN dalam bentuk Undang-Undang; 2) menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan Permensos Nomor 3 Tahun 2025; 3) menetapkan target nasional cakupan DTSEN; 4) memperkuat mekanisme partisipasi dan transparansi publik; 5) membuat anggaran khusus untuk pengembangan dan pemutakhiran DTSEN; 6) melakukan investasi pada penguatan kapasitas SDM; 7) evaluasi dan monitoring berkala. Selain itu Komisi VIII DPR RI dapat berperan melakukan pengawasan terhadap sinergi lintas kementerian/lembaga, agar DTSEN pemanfaatan DTSEN optimal.

Program bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen penting dalam menjaga perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia. Namun dalam praktiknya, kebijakan bansos masih menghadapi tantangan serius berupa *inclusion error* (penerima bansos yang seharusnya tidak layak) dan *exclusion error* (warga miskin yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdata). Ketidaktepatan sasaran ini tidak hanya menghambat efektivitas program, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap tata kelola bansos.

Masih terdapatnya *inclusion* dan *exclusion error* dalam penyaluran bantuan sosial tercermin dari berbagai temuan BPK (2025) terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) antara lain; 1) usulan data baru dan sanggahan belum diverifikasi (224.635 usulan dan 7.267 sanggahan); 2) terdapat 1,69 juta orang meninggal masih aktif DTKS, 9.404 ASN dan 5,6 juta pekerja bergaji di atas UMP masih dalam DTKS; 3) 1,69 juta orang meninggal masih aktif DTKS dan 9.404 ASN dan 5,6 juta

pekerja bergaji di atas UMP masih dalam DTKS. Dengan demikian, ketidaktepatan ini memperlihatkan permasalahan cukup sistemis yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Penelitian PA3KN (2025) di Kota Batam dan Kota Bandung juga memperkuat temuan tersebut, dengan mengidentifikasi berbagai kendala implementasi DTKS di lapangan. Tantangan teknis yang dihadapi antara lain mobilitas responden, kekuatan sinyal *internet provider*, stabilitas *server*, kelengkapan data, kualitas *device*, penguasaan lapangan, cukup banyak hari libur nasional dan *workload* Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, tantangan implementasi DTKS antara lain: 1) tidak adanya kriteria DTKS yang komprehensif misalnya belum ada kriteria untuk keterpencilan, korban kekerasan, pekerjaan yang dikecualikan (PNS, TNI, Polri, pensiunan) masih masuk DTKS termasuk klasifikasi kemiskinan yang tidak mempertimbangkan kepemilikan kendaraan listrik, penghasilan, pendidikan dan lain-lain; 2) tidak ada monitoring rutin penggunaan DTKS oleh internal/

*) Analisis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

eksternal; 3) tidak ada SOP lengkap terkait mekanisme usulan, verifikasi, dan validasi dari semua kanal (daerah, aplikasi mandiri, lembaga), 4) tidak ada kerja sama data efektif antar instansi wali data seperti BKN, BPJS, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), dan lain sebagainya (BPK, 2025).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Inpres ini menginstruksikan 18 kementerian/lembaga untuk mengambil langkah strategis dalam membangun dan mengintegrasikan data sosial-ekonomi melalui penggabungan tiga basis data utama: DTKS (Kemensos), P3KE (Kemenko PMK), dan Regsosek (Bappenas), serta sumber data lain seperti BPJS, PLN, dan Pertamina. Integrasi data ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi, pemutakhiran, dan interoperabilitas informasi untuk pelaksanaan kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran. DTSEN bertujuan membentuk basis data tunggal yang akuntabel, efisien, dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat. Selain sebagai instrumen administratif, DTSEN juga diharapkan menjadi infrastruktur kebijakan yang mampu mempercepat graduasi kemiskinan.

Sebagai turunan dari Inpres tersebut, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Permensos Nomor 3 Tahun 2025). Permensos Nomor 3 Tahun 2025 diterbitkan untuk mengatur pelaksanaan integrasi, pemutakhiran, dan pemanfaatan DTSEN. Permensos Nomor 3 Tahun 2025 dirancang sebagai landasan operasional untuk menjamin DTSEN dapat diimplementasikan secara efektif oleh berbagai pihak, dari pusat hingga daerah. Permensos Nomor 3 Tahun 2025 mencakup mekanisme

verifikasi dan validasi data, pemutakhiran berkala berbasis partisipasi publik, pemeringkatan kesejahteraan melalui sistem desil berdasarkan 36 variabel dari BPS, serta ruang usul-sanggah dari masyarakat untuk memperbaiki data. Melalui pendekatan ini, diharapkan *inclusion* dan *exclusion error* yang selama ini membayangi sistem bansos dapat diminimalisir.

Namun demikian, muncul pertanyaan penting: Apakah Permensos Nomor 3 Tahun 2025 benar-benar dapat menjadi solusi atas permasalahan ketidaktepatan sasaran bansos di Indonesia? Apakah regulasi ini cukup kuat dan operasional dalam mengatasi persoalan struktural dan teknis dari integrasi data sosial-ekonomi nasional. Berangkat dari pertanyaan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas Permensos Nomor 3 Tahun 2025 telah berhasil mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*.

Sekilas tentang Permensos Nomor 3 Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Kementerian Sosial menerbitkan Permensos Nomor 3 Tahun 2025. Regulasi ini dimaksudkan untuk menjabarkan secara teknis pelaksanaan DTSEN di lapangan. Permensos Nomor 3 Tahun 2025 mengatur tiga aspek utama:

Pertama, integrasi data, melalui penguatan mekanisme verifikasi dan validasi, peningkatan interoperabilitas dan aksesibilitas antar-Kementerian/Lembaga, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung keamanan dan keandalan data. **Kedua**, pemutakhiran data, dilakukan secara berkala dan dinamis. Mekanismenya meliputi penyampaian data administratif dan statistik, *ground checking*, verifikasi silang dengan data Dukcapil dan instansi terkait, serta partisipasi publik melalui proses usul dan sanggah. **Ketiga**, pemanfaatan data, digunakan sebagai dasar pemeringkatan kesejahteraan keluarga melalui sistem desil yang ditetapkan oleh BPS, dari Desil 1

(termiskin) hingga Desil 10 (terkaya). Program bansos kemudian diprioritaskan untuk Desil 1–5 (Kendalkemlagi, 2025).

Meskipun Permensos Nomor 3 Tahun 2025 telah menjadi langkah awal penting, masih terdapat sejumlah hambatan. Petunjuk teknis pelaksanaan dari Permensos belum tersedia hingga pertengahan tahun 2025, dan implementasinya belum merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah seperti Kota Batam dan Bandung bahkan masih menggunakan DTKS sebagai acuan dalam dokumen perencanaan karena proses transisi ke DTSEN masih berlangsung.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan SDM juga menjadi hambatan. Tantangan seperti sinyal internet, kestabilan server, kualitas perangkat, beban kerja petugas PKH, serta tidak dilibatkannya Dinas Sosial secara langsung dalam verifikasi lapangan turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan regulasi ini. Ketiadaan anggaran khusus untuk pengembangan DTSEN juga memperlemah daya dorong dari implementasi kebijakan ini.

Benchmarking: Parameter Keberhasilan Sistem Data Tunggal di Kawasan Latin America and the Caribbean

Negara-negara di kawasan Latin America and the Caribbean (LAC) telah memiliki pengalaman panjang dalam membangun dan memanfaatkan sistem data tunggal kemiskinan. Berdasarkan studi World Bank (2025), terdapat sejumlah parameter keberhasilan yang dapat menjadi rujukan:

Pertama, cakupan data penduduk miskin dan rentan yang luas, mencapai lebih dari 80% di negara-negara seperti Kolombia, Kosta Rika, Argentina, Uruguay, dan Chili. Sebaliknya, negara-negara di Amerika Tengah dan Bolivia memiliki cakupan rendah (<10%). **Kedua**, pemanfaatan lintas program, seperti yang terjadi di Brasil (33 program nasional) dan Chili (25 program nasional). Data tunggal digunakan untuk berbagai intervensi sosial, dari transfer tunai hingga layanan pendidikan dan kesehatan.

Ketiga, pemutakhiran berkala dan terstruktur, termasuk integrasi teknologi, verifikasi lapangan, dan pelibatan warga. Di Kolombia, SISBEN IV memungkinkan warga mengecek skor kesejahteraan mereka secara daring. **Keempat**, sistem pemeringkatan sosial berbasis indikator komprehensif, termasuk kepemilikan aset, kondisi rumah, akses pendidikan, sanitasi, dan wilayah geografis. **Kelima**, perlindungan data dan privasi, yang tetap dijaga meski akses data dimanfaatkan untuk pelayanan publik.

Contoh sukses seperti Cadastro Único di Brasil mampu menurunkan kemiskinan ekstrem dari 9,7% menjadi 4,3% dalam 10 tahun melalui integrasi data dengan program bantuan keluarga *Bolsa Familia*. Di Kolombia, SISBEN IV mencerminkan pendekatan yang transparan dan terdesentralisasi, memungkinkan akurasi tinggi serta kepercayaan publik terhadap data.

Analisis Gap Antara Permensos No.3 Tahun 2025 Dengan Parameter Keberhasilan

Berdasarkan perbandingan dengan praktik negara-negara LAC, Tabel 1 berikut adalah analisis kesenjangan (gap) antara apa yang diatur dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2025 dan parameter keberhasilan internasional.

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa Permensos Nomor 3 Tahun 2025 telah mengatur sejumlah aspek penting, namun belum sepenuhnya mengadopsi parameter keberhasilan sebagaimana praktik terbaik internasional. Secara khusus, kelemahan terlihat pada aspek cakupan data yang tidak terukur, keterbatasan pemanfaatan data lintas sektor, minimnya transparansi sistem desil, serta belum adanya regulasi teknis yang menyelaraskan perlindungan data pribadi dengan kebutuhan operasional di lapangan.

Rekomendasi

Permasalahan *inclusion* dan *exclusion error* dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia menjadi latar belakang utama

Tabel 1. Analisis Gap Antara Permensos No.3 Tahun 2025 Dengan Parameter Keberhasilan

Parameter Benchmarking	Kondisi Ideal (LAC)	Implementasi Permensos	GAP / Kesenjangan
Cakupan Data	>80% penduduk miskin & rentan	Tidak disebutkan target cakupan eksplisit	Tidak adanya indikator capaian cakupan dalam Permensos
Pemanfaatan Multi-Program	Digunakan lintas sektor dan level pemerintahan	Digunakan untuk bansos & pemberdayaan	Belum dijelaskan pemanfaatan di luar Kemensos
Pemutakhiran Data	Berkala, partisipatif, verifikasi lapangan	Diatur dengan partisipasi usul/sanggah	Tantangan di lapangan: beban kerja PKH, sinyal, perangkat
Transparansi Penilaian	Masyarakat bisa cek skor mereka	Sistem desil 1–10 oleh BPS	Tidak dijelaskan mekanisme transparansi skor
Perlindungan Data	Ada regulasi & balancing akses	Terkendala UU PDP	Tidak ada mekanisme khusus dalam Permensos untuk mengatasi kendala akses
Kelembagaan & Anggaran	Koordinasi lintas instansi dengan dukungan anggaran	Koordinasi belum solid, tidak ada anggaran khusus DTSEN	Lemahnya dukungan struktural dan finansial

Sumber: Penulis (2025), diolah.

lahirnya kebijakan integrasi data sosial dan Permensos Nomor 3 Tahun 2025, pemerintah berupaya membangun sistem data tunggal yang akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan lintas program. Permensos Nomor 3 Tahun 2025 mengatur aspek penting seperti integrasi, pemutakhiran, dan pemanfaatan data berbasis sistem desil, serta membuka ruang partisipasi publik.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa Permensos Nomor 3 Tahun 2025 belum sepenuhnya mencakup parameter keberhasilan sistem data tunggal sebagaimana ditunjukkan oleh praktik negara-negara di kawasan Latin America dan Caribbean (LAC). Terdapat kesenjangan dalam hal cakupan data, pemanfaatan lintas sektor, transparansi pemeringkatan, keterlibatan kelembagaan daerah, hingga belum terintegrasinya perlindungan data dengan kebutuhan operasional.

Oleh karena itu, perlu strategi penguatan regulasi, teknis, dan kelembagaan agar

DTSEN benar-benar menjadi solusi terhadap persoalan ketidaktepatan sasaran bansos. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk:

Pertama, menguatkan dasar hukum DTSEN dalam bentuk Undang-Undang, bukan hanya Inpres atau Permensos, agar memiliki kekuatan legal yang lebih tinggi dan menghindari tumpang tindih dengan peraturan lain, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kedua, menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan Permensos Nomor 3 Tahun 2025, agar implementasi DTSEN di lapangan lebih terarah, seragam, dan dapat diawasi. **Ketiga**, menetapkan target nasional cakupan DTSEN, misalnya >80% populasi miskin dan rentan, sebagaimana standar internasional dan mendorong adopsi di seluruh kabupaten/kota, agar data benar-benar representatif dan digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah. **Keempat**, memperkuat mekanisme partisipasi dan

transparansi publik, termasuk membuka akses bagi masyarakat untuk mengecek status atau skor desil mereka, serta menyediakan saluran pengaduan yang efektif terhadap kesalahan data.

Kelima, membuat anggaran khusus untuk pengembangan dan pemutakhiran DTSEN, baik dari APBN maupun APBD, perlu dijamin untuk mendukung infrastruktur digital, keamanan siber, dan operasionalisasi lapangan. **Keenam**, melakukan investasi pada penguatan kapasitas SDM, terutama petugas lapangan seperti PKH, operator Dinas Sosial, dan aparatur desa, melalui pelatihan digital, literasi data, serta pemahaman atas sistem verifikasi dan validasi berbasis desil.

Ketujuh, evaluasi dan monitoring berkala terkait akurasi dan relevansi data DTSEN, melalui pengembangan sistem evaluasi berbasis indikator kualitas data dan pemanfaatannya di berbagai program.

Komisi VIII DPR RI dapat berperan melakukan pengawasan terhadap sinergi lintas kementerian/lembaga, agar DTSEN pemanfaatan optimal, tidak hanya aspek perlindungan sosial oleh Kemensos, tetapi juga oleh sektor kesehatan, pendidikan, perumahan, termasuk pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

BPK. (2025). Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Kementerian Sosial dan Instansi Terkait Lainnya

Elan Satriawan. (2025). Focus Group Discussion dengan tema Data Tunggal Kemiskinan di PA3KN, Badan Keahlian DPR.

Guay, Jennifer. (2017). *Brazil Lifts Millions Out of Poverty with Direct Cash Transfer Scheme: By Tying Cash Benefits to Health and Education, Brazil is Breaking the Cycle of Poverty*. Diakses melalui: [https://apolitical.co/solution-articles/en/brazil-](https://apolitical.co/solution-articles/en/brazil-lifts-millions-poverty-direct-cash-transfer-scheme)

[lifts-millions-poverty-direct-cash-transfer-scheme](https://apolitical.co/solution-articles/en/brazil-lifts-millions-poverty-direct-cash-transfer-scheme), pada 17 Juni 2025.

KemenpanRB. (2025). Akselerasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, Menteri Rini: Perkuat Tata Kelola Integrasi Data Berbasis Digital, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, Menteri Rini: Perkuat Tata Kelola Integrasi Data Berbasis Digital diakses pada 17 Juli 2025 di <https://www.menpan.go.id/site/>.

Kendalkemlagi. (2025). Mengenal DTSEN: Penentu Baru Penerima Bansos PKH dan BPNT Sesuai Aturan Kemensos 2025, diakses pada 18 Juli 2025 di Website Kendalkemlagi, <https://kendalkemlagi.desa.id/artikel/2025/07/02/mengenal-dtsen-penentu-baru-penerima>.

Kompas. (2025). Mulai April, Penyaluran Bansos Pakai DTSEN, diakses pada 17 Juli 2025 di https://www.kompas.id/artikel/mulai-april-penyaluran-bansos-pakai-dtsen?open_from=Search_Result_Page

Kompas. (2025). Revolusi Data Sosial Ekonomi Nasional, diakses pada 15 Juli 2025 di <https://www.kompas.id/artikel/revolusi-data-sosial-ekonomi>

PA3KN. (2025). Laporan Studi Kasus Bandung dengan tema “Penguatan Penyusunan Analisis Tantangan Pengalihan DTKS Menjadi DTSEN Untuk Optimalisasi Penyaluran Bansos Yang Tepat Sasaran (Studi Kasus: Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat).

PA3KN. (2025). Laporan Studi Kasus Batam dengan tema “Penguatan Penyusunan Analisis Tantangan Pengalihan DTKS Menjadi DTSEN Untuk Optimalisasi Penyaluran Bansos Yang Tepat Sasaran (Studi Kasus: Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau).

Worldbank. (2025). *State of the Art of Social Registries in Latin America and the Caribbean*. Washington DC: Worldbank.

Sekolah Rakyat sebagai Program Pendidikan Afirmatif: Analisis SWOT

Nadya Ahda*)

Abstrak

Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Inpres Nomor 8 Tahun 2025), Presiden menginstruksikan optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi seluruh komponen pemerintahan, yang salah satunya dimanifestasikan melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menawarkan pendidikan gratis beserta dengan fasilitas pendukung pendidikan lainnya dengan menasar pada rumah tangga miskin dan miskin ekstrem. Artikel ini menganalisis program Sekolah Rakyat dengan pendekatan SWOT. Dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari program, harapannya Komisi VIII, IX, dan X dapat merekomendasikan dan merumuskan strategi kebijakan untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah guna perbaikan implementasi Sekolah Rakyat ke depannya.

Melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, Pemerintah menyampaikan strategi pelaksanaan fungsi pendidikan tahun 2026 melalui salah satu program prioritas, yaitu Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat merupakan program pembangunan sekolah tanpa biaya untuk seluruh jenjang pendidikan dengan tujuan memutus mata rantai kemiskinan, yang disahkan melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Program ini menasar pada rumah tangga miskin dan miskin ekstrem. Program ini telah dibahas oleh pemerintah dan DPR RI, salah satunya melalui Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial pada 7 Juli 2025. Pada rapat tersebut, DPR RI menyampaikan berbagai masukan serta dukungan untuk program, salah satunya menyetujui anggaran Sekolah Rakyat sebesar Rp1,19 triliun untuk implementasi Sekolah Rakyat tahap pertama (DPR RI, 2025a). Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat per akhir Juli 2025, di mana 63 di antaranya sudah beroperasi per 14 Juli 2025, bertepatan dengan minggu pertama tahun ajaran baru (Kementerian Sosial, 2025c). Guna penguatan dan perbaikan program ke depan, tulisan ini akan menganalisis

Sekolah Rakyat melalui pendekatan SWOT.

Strengths (S) Sekolah Rakyat

Melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025, Presiden RI menginstruksikan seluruh komponen pemerintahan untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Tujuan tersebut dimanifestasikan salah satunya melalui instruksi pelaksanaan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat dinilai menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Investasi pada pendidikan diketahui menjadi katalis pembangunan yang paling efektif dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem (World Bank, 2023). Program ini juga sejalan dengan rekomendasi World Bank (2024) bagi negara berpendapatan rendah untuk memprioritaskan strategi penurunan kemiskinan melalui kebijakan pendidikan.

Ditujukan bagi rumah tangga miskin, Sekolah Rakyat memberikan berbagai fasilitas berupa pendidikan tanpa biaya, peralatan sekolah, makanan sehari-hari, dan asrama. Pada saat yang sama, pendidikan gratis sebenarnya juga ditawarkan oleh program lain seperti program Bantuan Operasional

*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Sekolah (BOS). Secara tidak langsung, program bantuan pendidikan lain pun membantu mengurangi biaya pendidikan, misalnya Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada level nasional, serta Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada level daerah. Berdasarkan beberapa program bantuan pendidikan yang ada, sebagian rumah tangga miskin ditemukan masih belum dapat menyekolahkan anaknya karena keterbatasan dana (World Bank, 2020). Biaya pendidikan lain yang tidak ditanggung, seperti biaya transportasi dan seragam, dinilai masih memberatkan rumah tangga miskin (World Bank, 2020). Selain SPP, biaya seragam dan buku menjadi komponen biaya pendidikan terbesar yang harus ditanggung rumah tangga, yaitu mencapai lebih dari 30 persen untuk jenjang SD (World Bank, 2013). Oleh karena itu, Sekolah Rakyat hadir untuk menanggung seluruh biaya pendidikan yang tidak ditanggung program lainnya. Sistem asrama juga dinilai dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin dengan ditanggungnya biaya makan dan tempat tinggal.

Pemerintah secara proaktif juga melakukan rekrutmen, verifikasi, dan asesmen langsung pada rumah tangga miskin berdasarkan DTSEN dengan bantuan pendamping PKH untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat tepat sasaran. Sistem proaktif dinilai dapat mengurangi potensi *exclusion* dan *inclusion error*, yang mana hal ini masih terjadi di program bantuan sosial lain seperti PKH dan Program Sembako (Kementerian Sosial, 2025a). Pada Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dan Kementerian Sosial pada 15 Juli 2025, Kementerian Sosial mengklaim masih adanya 45 persen penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran (CNN Indonesia, 2025). Oleh karena itu, Kementerian Sosial menjamin perbaikan transparansi pada proses seleksi Sekolah Rakyat, salah satunya melalui pengecekan DTSEN sekaligus verifikasi lapangan. Selain untuk meningkatkan ketepatan sasaran, proses rekrutmen proaktif juga dinilai dapat

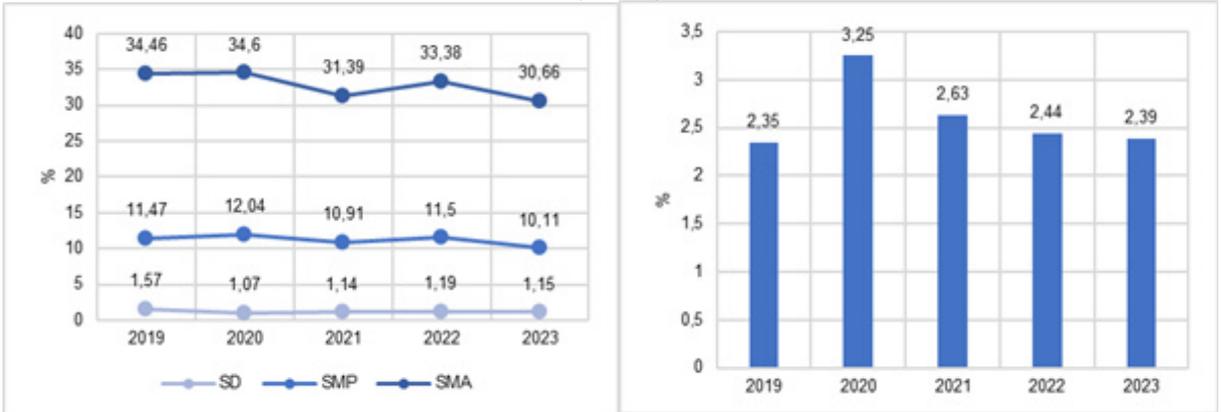
meningkatkan paparan rumah tangga terhadap pentingnya pendidikan. Hal ini masih relevan karena perluasan akses pendidikan pada daerah yang terpencil sering kali diperburuk dengan aspirasi pendidikan dari rumah tangga yang masih rendah (OECD/Asian Development Bank, 2015).

Weaknesses (W) Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat dinilai menjadi program yang padat biaya karena program ini menanggung seluruh biaya pendidikan. Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial pada 20 Mei 2025, Kementerian Sosial menyampaikan indeks pembiayaan per siswa adalah Rp48,25 juta per tahun, setidaknya untuk tahun pertama (Kompas, 2025). Apabila dibandingkan dengan nominal bantuan dari program pendidikan serupa, seperti PIP (Rp450 ribu/tahun untuk SD, Rp750 ribu/tahun untuk SMP, dan Rp1 juta/tahun untuk SMA) dan PKH (Rp900 ribu/tahun untuk SD, Rp1,5 juta/tahun untuk SMP, dan Rp2 juta/tahun untuk SMA), maka indeks biaya per siswa per tahun Sekolah Rakyat dinilai relatif sangat tinggi. Hal ini kemudian memunculkan isu lain, yaitu skalabilitas. Dengan target pembangunan sekolah pada seluruh jenjang pendidikan (SD-SMP-SMA) dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka skalabilitas program akan rentan terhadap ketersediaan anggaran.

Sedikit berbeda dengan sekolah reguler, Sekolah Rakyat akan menggunakan kurikulum yang dirancang khusus (*tailor-made*) berdasarkan kebutuhan dan kemampuan siswa. Sekolah Rakyat juga akan menerapkan metode *multi-entry* dan *multi-exit*, yaitu siswa dapat masuk di level manapun sesuai pencapaian pembelajaran dan dapat melanjutkan ke level selanjutnya apabila sudah mencapai target pembelajaran. Hal ini mengimplikasikan kompleksitas implementasi yang tinggi, yang mana kurikulum seperti ini akan membutuhkan guru yang terlatih dan sistem asesmen yang detail. Pada saat yang sama, kualitas guru secara umum di Indonesia

Gambar 1. Persentase Anak Tidak Sekolah pada Kelompok Pengeluaran Kuintil 1 Tahun 2019-2023 (kiri); Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Tahun 2019-2023 (kanan)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024), Badan Pusat Statistik (2025), diolah.

dinilai masih kurang optimal, salah satunya dicerminkan melalui kurang efektifnya guru dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa (SMERU, 2022).

Opportunities (O) Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat secara spesifik menysasar pada rumah tangga dengan kelompok pengeluaran terkecil, yaitu pada desil 1 dan desil 2 (kuintil 1) agar dapat mencapai tujuan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2023, masih terdapat 1,15 persen anak usia SD dari rumah tangga kuintil 1 yang tidak bersekolah (Gambar 1 kiri). Pada jenjang SMP dan SMA, ditemukan lebih banyak anak yang tidak bersekolah, yaitu sebesar 10,11 persen dan 30,66 persen pada tahun yang sama. Selama periode 2019-2023, proporsi anak tidak sekolah pada seluruh jenjang tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Kondisi ini menciptakan peluang bagi Sekolah Rakyat untuk berkontribusi dan berkembang. Selain itu, fenomena pekerja anak juga masih terjadi di Indonesia. Pada tahun 2023, sebanyak 2,39 persen dari anak usia 10-17 tahun ditemukan sudah bekerja (Gambar 1 kanan). Hal ini juga memberikan kesempatan bagi Sekolah Rakyat untuk mengurangi prevalensi pekerja anak.

Selain melibatkan pemangku kebijakan dari Pemerintah, Sekolah Rakyat juga diketahui melibatkan pihak swasta seperti Yayasan Lembaga Pendidikan Islam

(YLPI) Al Hikmah berkaitan dengan kurikulum dan metode pembelajaran (Kementerian Sosial, 2025b). Hal ini turut memberikan peluang bagi program untuk berkembang dengan mengadopsi praktik kurikulum serupa yang sudah berhasil. Di samping itu, Pemerintah juga disebutkan tidak menutup kemungkinan untuk bermitra dengan swasta berkaitan dengan pengadaan atau pendanaan program ke depan.

Selanjutnya, untuk memastikan ketersediaan guru, Sekolah Rakyat sudah membuka pendaftaran guru Sekolah Rakyat sejak Juni 2025. Per 14 Juli 2025, 100 kepala sekolah dan 1.469 guru dilaporkan siap bertugas di Sekolah Rakyat (Kementerian PPN/Bappenas, 2025). Hal ini mengimplikasikan peluang Sekolah Rakyat untuk menyerap lebih banyak lulusan keguruan di tengah rencana ekspansi Sekolah Rakyat ke depan. Isu ini relevan dengan fenomena Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang banyak menghasilkan lulusan keguruan namun daya serap pada pasar tenaga kerja untuk guru masih kurang optimal (Kementerian Koordinator PMK, 2021).

Threats (T) Sekolah Rakyat

Pada saat yang sama, kekhawatiran akan adanya stigmatisasi “sekolah untuk orang miskin” dan segregasi sosial muncul di tengah implementasi Sekolah Rakyat.

Tabel 1. Analisis SWOT Program Sekolah Rakyat

Faktor Internal	
<i>Strengths (S)</i>	<i>Weaknesses (W)</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan untuk memutus rantai kemiskinan 2. Fasilitas yang besar serta menyoasar pada biaya pendidikan lainnya 3. Sistem seleksi berdasarkan DTSEN dan rekrutmen proaktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program padat biaya dan isu skalabilitas 2. Kurikulum relatif kompleks
Faktor Eksternal	
<i>Opportunities (O)</i>	<i>Threats (T)</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Prevalensi anak tidak bersekolah dan pekerja anak 2. Potensi kemitraan dengan pihak lain 3. Penyerapan lulusan keguruan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu stigmatisasi 2. Kompetisi anggaran dengan program prioritas lain

Sumber: Penulis (2025), diolah.

Model Sekolah Rakyat mengimplikasikan adanya pemisahan anak rumah tangga miskin dengan kelompok masyarakat lainnya, yang semakin intens dengan sistem asrama. Komisi X DPR RI pun turut menyampaikan kekhawatiran akan isu stigma dan diskriminasi yang diakibatkan oleh program ini (Tempo, 2025). Kekhawatiran adanya eksklusivitas dari Sekolah Rakyat juga disoroti oleh Ketua DPR RI (DPR RI, 2025c). Isu ini penting karena stigmatisasi dapat berpengaruh negatif terhadap motivasi dan perkembangan psikologis siswa. Apabila stigma meluas, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap persepsi pasar tenaga kerja terhadap lulusan Sekolah Rakyat.

Selanjutnya, besarnya indeks biaya per siswa dari Sekolah Rakyat tidak hanya mengimplikasikan potensi beban anggaran, namun juga kompetisi anggaran dengan program prioritas lainnya. Pada periode ini, setidaknya pemerintah membiayai berbagai 11 program prioritas, antara lain: (1) Koperasi Desa Merah Putih: Rp200 triliun; (2) Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp121 triliun; (3) program 3 juta rumah (FLPP): Rp41,88 triliun; (4) lumbung pangan: Rp23,16 triliun; (5) pembangunan bendungan dan irigasi: Rp20,5 triliun; (6) rehabilitasi sekolah: Rp19,5 triliun; (7) Sekolah Rakyat: Rp11,6 triliun; (8) Cek Kesehatan Gratis (CKG):

Rp3,4 triliun; (9) Sekolah Unggul Garuda: Rp2 triliun; (10) pembangunan rumah sakit berkualitas: Rp1,7 triliun; dan (11) penuntasan tuberkulosis: Rp1,5 triliun (Kementerian Keuangan, 2025). Hal ini mengimplikasikan ketersediaan anggaran untuk Sekolah Rakyat juga rentan terhadap dinamika anggaran program prioritas lainnya. Ancaman anggaran juga disoroti oleh Komisi X DPR RI, dengan mengangkat kekhawatiran adanya potensi tumpang tindih kewenangan dan pengelolaan anggaran antar-kementerian yang terlibat, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (DPR RI, 2025b).

Strategi Program ke Depan

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari program yang ada, harapannya Komisi VIII, IX, dan X dapat merekomendasikan dan merumuskan strategi kebijakan untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang sekaligus mengatasi kelemahan dan ancaman dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat ke depan. **Pertama**, dengan strategi *strengths-opportunities* (SO), Pemerintah dapat memanfaatkan tujuan Sekolah Rakyat dalam memutus rantai kemiskinan untuk menjangkau anak-anak yang tidak bersekolah sekaligus pekerja anak. Selanjutnya, dengan

adanya rekrutmen proaktif, pemerintah juga dapat menjangkau anak-anak yang tidak bersekolah ketika rumah tangga miskin enggan mendaftarkan sekolah secara mandiri. Besarnya fasilitas yang ditawarkan oleh Sekolah Rakyat juga dinilai dapat menarik anak-anak yang tidak bersekolah karena mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Kedua, dengan strategi *weaknesses-opportunities* (WO), Pemerintah dapat meminimalkan beban anggaran Sekolah Rakyat dengan membuka kemitraan dengan swasta. Melalui kemitraan, Pemerintah juga dapat mengurai kurikulum yang kompleks untuk diaplikasikan pada Sekolah Rakyat, sebagaimana kesepakatan yang sudah berjalan dengan lembaga pendidikan swasta. Berkaitan dengan isu skalabilitas, Pemerintah perlu melakukan pendataan jumlah anak tidak bersekolah di setiap wilayah Indonesia untuk mengukur target sasaran beberapa tahun ke depan. Pengukuran target ini bermanfaat untuk memperkirakan kemampuan program untuk berekspansi namun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Selanjutnya, bersamaan dengan perbaikan kurikulum pendidikan dan rekrutmen keguruan yang direkomendasikan SMERU (2022), perbaikan kualitas guru dalam jangka panjang dinilai dapat membantu dalam implementasi kurikulum Sekolah Rakyat yang kompleks.

Ketiga, dengan strategi *strengths-threats* (ST), Pemerintah dapat mengatasi ancaman isu stigmatisasi dari masyarakat dengan mengedepankan *branding* Sekolah Rakyat dengan lebih humanis dan inklusif. Dibandingkan dengan pelabelan sekolah untuk orang miskin, Sekolah Rakyat dapat dinarasikan sebagai pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara yang belum bersekolah, yang mana penentuan kelayakannya didasarkan pada DTSEN dan verifikasi langsung. Pemerintah juga harus memastikan besarnya fasilitas pendidikan yang ditawarkan Sekolah Rakyat juga memenuhi standar selayaknya sekolah reguler, sehingga tidak

menimbulkan kesan inferior. Berkaitan dengan kompetisi anggaran dengan program prioritas lainnya, Pemerintah dapat mempertahankan keberlanjutan anggaran untuk Sekolah Rakyat dengan memastikan bahwa anggaran Sekolah Rakyat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat diwujudkan dengan memanfaatkan keunggulan asesmen kelayakan penerima manfaat Sekolah Rakyat melalui DTSEN dan verifikasi langsung.

Keempat, dengan strategi *weaknesses-threats* (WT), Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk merumuskan target skalabilitas yang lebih realistis. Misalnya Pemerintah dapat berfokus pada daerah dengan prevalensi anak tidak bersekolah tertinggi. Hal ini dinilai dapat mengurangi beban anggaran ke depan serta menjaga keberlangsungan Sekolah Rakyat di tengah kompetisi anggaran dengan program unggulan lainnya.

Daftar Pustaka

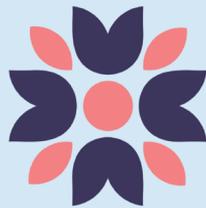
Badan Pusat Statistik. (2024). Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Kelompok Pengeluaran, 2019-2023. Pendidikan. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4OCMy/angka-anak-tidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-kelompok-pengeluaran.html>

Badan Pusat Statistik. (2025). Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi (Persen), 2019-2023. Tenaga Kerja. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAwOCMy/persentase-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi--persen-.html>

CNN Indonesia. (2025). 45% Penerima BansosPKH Diduga Salah Sasaran, Subsidi BBM 60%. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250715195745-92-1251058/45-penerima-bansos-pkh-diduga-salah-sasaran-subsidi-bbm-60>

DPR RI. (2025a). Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial RI. <https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan-dewan/8/hasil-rapat>

- DPR RI. (2025b). Komisi X: Perhatikan Potensi Tumpang Tindih Kewenangan dan Anggaran Program Sekolah Rakyat. <https://emedia.dpr.go.id/2025/03/17/komisi-x-perhatikan-potensi-tumpang-tindih-kewenangan-dan-anggaran-program-sekolah-rakyat/>
- DPR RI. (2025c). Sekolah Rakyat Harus Jadi Pelengkap, Bukan Kompetitor Pendidikan Formal. <https://emedia.dpr.go.id/2025/07/17/sekolah-rakyat-harus-jadi-pelengkap-bukan-kompetitor-pendidikan-formal/>
- Kementerian Keuangan. (2025). Manfaat #UangKita Juni 2025. <https://x.com/KemenkeuRI/status/1929899424622489692>
- Kementerian Koordinator PMK. (2021). LPTK Jangan Asal Buka Prodi. <https://www.kemenkopmk.go.id/lptk-jangan-asal-buka-prodi>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2025). Siapa Tenaga Didik Sekolah Rakyat? <https://x.com/BappenasRI/status/1948636498498388170>
- Kementerian Sekretariat Negara. (2025). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- Kementerian Sosial. (2025a). Laporan Kinerja Kementerian Sosial 2024. <https://kemensos.go.id/unduh/laporan/Laporan-Kinerja-Kementerian-Sosial-Tahun-2024>
- Kementerian Sosial. (2025b). Gus Ipul Tekankan Pentingnya Teknologi dalam Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. <https://sekolahrakyat.kemensos.go.id/berita/Gus-Ipul-Tekankan-Pentingnya-Teknologi-dalam-Penyelenggaraan-Sekolah-Rakyat>
- Kementerian Sosial. (2025c). MPLS Sekolah Rakyat Resmi Dimulai, Serentak di 63 Titik di Seluruh Indonesia. <https://sekolahrakyat.kemensos.go.id/berita/MPLS-Sekolah-Rakyat-Resmi-Dimulai,-Serentak-di-63-Titik-di-Seluruh-Indonesia>
- Kompas. (2025). Biaya Sekolah Rakyat Mencapai Rp 48,2 Juta untuk Tiap Siswa per Tahun. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/20/17262401/biaya-sekolah-rakyat-mencapai-rp-482-juta-untuk-tiap-siswa-per-tahun>
- OECD/Asian Development Bank. (2015). *Education in Indonesia: Rising to the Challenge*. <https://doi.org/10.1787/9789264230750-7-en>
- SMERU. (2022). *Improving the Quality of Teacher Education Delivery in Indonesia*. <https://rise.smeru.or.id/en/publication/improving-quality-teacher-education-delivery-indonesia>
- Tempo. (2025). Sekolah Rakyat Dianggap Rawan Diskriminasi, Begini Tanggapan Menteri Sosial. https://www.tempo.co/politik/sekolah-rakyat-dianggap-rawan-diskriminasi-begini-tanggapan-menteri-sosial-1225201#goog_rewarded
- World Bank. (2013). "Free" Basic Education For All? *Understanding Household Education Spending Patterns and Trends*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/721341468269668343/f/809790BRI0Hous0res0379824B00PUBLIC0.pdf>
- World Bank. (2020). *The Promise of Education in Indonesia*. <https://doi.org/10.1596/34807>
- World Bank. (2023). *Ending Learning Poverty and Building Skills: Investing in Education from Early Childhood to Lifelong Learning (Issue April)*. <https://thedocs.worldbank.org/en/c/9b9ecb979e36e80ed50b1f110565f06b-0200022023/related/WB-EducationBrochure-APRIL-12-23-e-version-FINAL.pdf>
- World Bank. (2024). *Ending Poverty for Half the World Could Take More Than a Century*. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/10/15/ending-poverty-for-half-the-world-could-take-more-than-a-century>



PA3KN
#Menyala

www.pa3kn.dpr.go.id
Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635
Instagram: @pa3kn.bkdprri
Youtube: PA3KN BK DPR RI

